

**KEBIJAKAN POLITIK IMAM NAHRAWI DALAM
PEMBEKUAN PSSI PERSPEKTIF POLITIK PROFETIK**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH:

FAHMAN ZENAL MUTAQIN

NIM: 11370054

PEMBIMBING:

DR. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.

NIP. 19681020 199803 1 002

**JURUSAN SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Fahman Zenal Mutaqin

NIM : 11370054

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan/Prodi : Siyasa

Judul Skripsi : Kebijakan Politik Imam Nahrawi Dalam Pembekuan PSSI Perspektif Politik Profetik

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain dan sepanjang sepengetahuan saya karya ilmiah ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi manapun kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan didalam daftar pustaka.

Hal yang mengenai perbaikan karya ilmiah ini akan diselesaikan dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya.

Yogyakarta, 10 Desember 2015

Saya yang menyatakan,



Fahman Zenal Mutaqin
Fahman Zenal Mutaqin
NIM: 11370054



FORMULIR KELAYAKAN SKRIPSI

Dosen : Dr.Ocktoberinsyah, M.Ag
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Fahman Zenal Mutaqin
Lamp : 4 eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fahman Zenal Mutaqin
NIM : 11370054
Jurusan/Prodi : Siyasah
Judul Skripsi : Kebijakan Politik Imam Nahrawi Dalam Pembekuan PSSI Perspektif Politik Profetik

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan/Prodi Siyasah pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 14 Desember 2015

Pembimbing

Dr. Ocktoberinsyah, M. Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor: UIN.02/DS/PP.00.9/03/2016

Tugas Akhir dengan Judul : KEBIJAKAN POLITIK IMAM NAHRAWI DALAM
PEMBEKUAN PSSI PERSPEKTIF POLITIK
PROFETIK

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

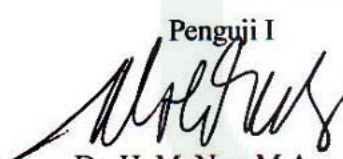
Nama : FAHMAN ZENAL MUTAQIN
Nomor Induk Mahasiswa : 11370054
Telah diujikankan pada : Selasa, 31 Desember 2015
Nilai Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

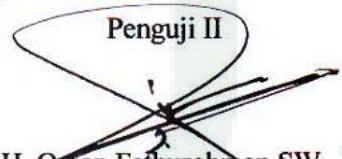
TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang


Dr. Ocktoberrihsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji I



Dr. H. M. Nur, M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji II


Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002

Yogyakarta, 31 Desember 2015

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN


Dr. H. Syafiq Mahmudah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

**Ulah Taluk Pedah Jauh Tong Hoream Pedah Anggang Jauh Kudu Dijugjug
Anggang Kudu Diteang.**

(Maju terus Pantang mundur)

Ulah Kumeok Samemeh Dipacok

(Seorang Kratria tidak boleh menyerah sebelum pertandingan dimulai)

" "

(Puncak Dari Segala Ilmu Dan Hikmah Adalah Takut Kepada Allah Swt)

-Mutiaras Kalam Hikmah-

Mapan Dulu. Baru Main!!!



HALAMAN PERSEMBAHAN

Ku Persembahkan Karya Sederhana Ini Untuk:

1. Kedua orang tua penulis, yaitu bapak tercinta Abbas Bastaman Ma'mun dan ibunda tercinta Nunung Nuryamah, yang telah berjuang, bekerja keras demi kelancaran pendidikan putra-putrinya. Juga yang selalu memberikan doa dan kepercayaan beriring kasih sayang dalam setiap langkah dan hela nafas penulis. Semoga Allah swt memberikan balasan berupa kasih sayang-nya di dunia dan surga-Nya di akhirat kelak, Amin.
2. Almamater Tercinta Jurusan Sigasah UIN Sunan Kalijaga. Semoga Dapat Menjadi Sumbangsih Yang Bermanfaat Dan Berguna.
3. Sahabat-sahabat di Asrama Al Maun serta MaHot Band yang telah membantu dan menghibur penulis, sehingga mampu memberi semangat lebih dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabat di Forsassy (Forum Silaturahmi Sukamanah Sukahdeng Yogyakarta) dan Keluarga Pelajar Mahasiswa Tasikmalaya (KPMT-Y).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نمد لله الذی انعمنا بنعمة الايمان والاسلام. ونصلي ونسلم على خير الالام سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan anugerah iman dan Islam kepada kita yang senantiasa memberikan nikmatNya dengan segala kasih dan sayang sehingga pada saat ini penulis mampu menyelesaikan langkah awal dalam usahanya menghilangkan kebodohan dengan setetes air dari samudera hakikatNya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad saw. Pemilik akhlak mulia yang mampu mengubah dunia dengan kelembutan tutur kata dan sikapnya, yang senantiasa kita harap syafa'atnya di hari akhir nanti, Amin.

Setelah perjuangan yang begitu panjang dengan senantiasa berpegang kepada pertolongan Allah swt. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: "Kebijakan Politik Imam Nahrawi Dalam Pembekuan PSSI Perspektif Politik Profetik".

Tidak ada yang sempurna di dunia ini, begitu juga dengan skripsi ini yang masih jauh dari kata sempurna. Meskipun demikian berkat rahmat dan

hidayahNya serta pertolongan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan penyusunannya. Dengan demikian, maka patut kiranya pada kesempatan dan melalui media tulisan ini peneliti menghaturkan terima kasih dan bangga yang besar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu. Mendorong dan juga memotivasi pada pengerjakan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Machasin, M.A, selaku Pgs Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. M. Nur, S. Ag., M. Ag selaku Ketua Jurusan Siyasah
4. Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag, sebagai pembimbing skripsi ini. Terima kasih atas bimbingannya dan arahan bapak sejak peneliti menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi ini hingga akhir sampai terselesainya skripsi ini.
5. Drs. H. Agus Maftuh, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Terimakasih ayah dan ibu tercinta dan tersayang tidak ada batasnya, yang selalu memberikan semangat serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat Siyasah angkatan 2011 yang telah membagi suka dukanya di kampus tercinta ini.

Selain itu penulis minta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak tersebut karena hanya ucapan teima kasih dan doa yang mampu peneliti

berikan. Semoga segala kebaikan kalian menjadi ibadah yang akan di balas oleh Allah swt dengan balasan yang setimpal. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada peneliti menjadi bekal ilmu yang bermanfaat. Akhir kata, peneliti ucapkan semoga karya ilmiah ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi sebuah motivasi tersendiri untuk peneliti dalam menggapai cita-cita, *amin ya robbal 'alamin*.

Yogyakarta, 8 Mei 2015

Penulis

Fahman Zenal Mutaqin

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak Dilambangkan
ب	B ’	B	Be
ت	T ’	T	Te
ث	,		Es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	H ’		Ha titik di bawah
خ	Kh ’	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	al		Zet titik di atas
ر	R ’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	S n	S	Es
ش	Sy n	Sy	Es dan ye
ص	d		Es titik di bawah
ض	D d		De titik di bawah
ط	T ’		Te titik di bawah
ظ	Za		Zet titik dibawah
ع	‘Ayn	... ‘ ...	Koma terbalik (di atas)

غ	Gayn	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
	Ditulis	<i>'Iddah</i>

III. *T' marb tah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

	Ditulis	ikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

2. Bila diikuti dengan kata sandang '*al*' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

ولياء	Ditulis	<i>Kar mah al-awliy '</i>
-------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'* marbutah hidup atau dengan harakat, *fat ah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis t atau ha

	Ditulis	<i>Zak h al-fi ri</i>
--	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

	Fathah	Ditulis	ضرب (<i>araba</i>)
	Kasrah	Ditulis	علم (<i>'alima</i>)
	Dammah	Ditulis	كتب (<i>kutiba</i>)

V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif, ditulis (garis di atas)

جاهلية	Ditulis	<i>J hiliyyah</i>
--------	---------	-------------------

2. Fathah + alif *maq r*, ditulis (garis di atas)

يسعى	Ditulis	<i>Yas'</i>
------	---------	-------------

3. Kasrah + *ya' mati*, ditulis (garis di atas)

مجيد	Ditulis	<i>Maj d</i>
------	---------	--------------

4. Dammah + wawu mati, ditulis (dengan garis di atas)

	Ditulis	<i>Fur</i>
--	---------	------------

VI. Vokal Rangkap

1. Fathah + y ' mati, ditulis ai

بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
-------	---------	-----------------

2. Fathah + wau mati, ditulis au

	Ditulis	<i>Qaul</i>
--	---------	-------------

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

	Ditulis	<i>A'antum</i>
	Ditulis	<i>U'iddat</i>
	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

	Ditulis	<i>Al-Qur' n</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiy s</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah

	Ditulis	<i>Al-Syams</i>
	Ditulis	<i>Al-sam '</i>

IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

X. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat dapat ditulis Menurut Penulisnya

	Ditulis	<i>awi al-fur</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PENGESAHAN	iii
FORMULIR KELAYAKAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	7
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II : KONSEP DASAR KEBIJAKAN DAN TEORI POLITIK	
PROFETIK	16
A. Teori Politik Profetik	16

1) Pengertian Politik Profetik	16
2) Nilai-Nilai Politik Profetik	17
B. Konsep Dasar Kebijakan	23
1) Pengertian Kebijakan Publik	23
2) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan .	32
BAB III : GAMBARAN UMUM PSSI DAN KEMENPORA	35
A. Gambaran Umum tentang PSSI	35
B. Gambaran Umum Kemenpora	40
C. Sepak Terjang Imam Nahrawi dalam Persepakbolaan	
Indonesia	47
D. Kronologi Pembekuan PSSI	48
BAB IV : PANDANGAN POLITIK PROFETIK TERHADAP	
KEBIJAKAN POLITIK IMAM NAHRAWI DALAM	
KASUS PEMBEKUAN PSSI	50
A. Mekanisme Kebijakan	52
B. Aktor Kebijakan	56
C. Dampak Kebijakan	58
D. Pandangan Profetik	60
1) Humanisasi dalam Kebijakan Pembekuan PSSI	60
2) Liberasi dalam Kebijakan Pembekuan PSSI	63
3) Transendensi dalam Kebijakan Pembekuan PSSI	64

BAB V : PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran-saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE	LIII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sepak bola merupakan cabang olahraga paling populer dan paling digemari di seluruh dunia. Pernyataan tersebut tidak bisa terbantahkan, bahkan rasanya tidak diperlukan sebuah penelitian ilmiah untuk mendapatkan pengesahan atas pernyataan tersebut. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh *Federation Internationale de Football Association* (FIFA) pada tahun 2001 menyatakan bahwa sepak bola adalah olahraga paling populer dimainkan hari ini.¹ Survei ini menunjukkan bahwa lebih dari 240 juta orang memainkan olahraga sepak bola di lebih dari 209 negara di hampir setiap bagian dari dunia.

Pertama kali sepak bola modern digagas dan kemudian disebarluaskan oleh orang Inggris ke segala penjuru dunia, mungkin tak ada yang mengira kalau suatu saat nanti sepak bola akan menjadi sebuah kekuatan maha dahsyat yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan dunia ini sepak bola mungkin hanya sebuah permainan, namun efek dari permainan tersebut telah jauh merasuk ke

¹www.bola.net/editorial/12-alasan-sepakbola-olahraga-nomor-satu-di-dunia.html.(diakses tanggal 24 November 2015) pukul 20.54

bidang-bidang lain seperti sosial keagamaan, teknologi informasi, hiburan, ekonomi, dan bahkan politik.²

Diantara aspek diatas, satu hal yang bisa kita lihat saat ini adalah ketika sepak bola bercampur dengan politik. Pengaruh sepak bola memang luar biasa, dengan sepak bola persatuan bangsa kita akan terjalin sangat kuat. Olahraga sepak bola mampu mengumpulkan masa yang begitu besar. Sebagai contohnya, ketika kesebelasan Indonesia U19 bertanding melawan Korea Selatan pada ajang AFC 2013 di Gelora Bung Karno yang berakhir dengan kemenangan Indonesia, para suporter serempak berdatangan ke stadion yang berkapasitas 88.000 penonton. Sementara seratus juta masyarakat yang lain dengan kompak dan semangat nasionalisme yang tinggi menyaksikan pertandingan melalui televisi. Dalam keadaan seperti ini tak heran jika mereka (para politisi) berlomba-lomba untuk mendapatkan simpati publik melalui sepak bola.³

Pada tanggal 17 April 2015 sejarah kelam terjadi di sepak bola Indonesia, yaitu saat Menpora mengeluarkan surat keputusan untuk pembekuan PSSI. Surat Keputusan Nomor 01307 Tahun 2015 tentang pengenaan sanksi administratif berupa kegiatan keolahragaan Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia. Kementerian Pemuda dan Olahraga tidak mengakui seluruh kegiatan yang dilakukan oleh PSSI yang dalam bahasa media massa disebut sebagai pembekuan.

² Arif Natakusumah, *Drama Itu Bernama Sepakbola*. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2008)

³ Bola.Liputan6.Com/Read/717666/3-Kunci-Taklukkan-Korsel-Salah-Satunya-Merahkan-Gbk. (diakses 24 November 2015) pukul 21.05

Perseteruan PSSI dengan Kemenpora sepertinya masih jauh dari kata damai, babak baru perseteruan dimulai lewat keputusan Menpora membekukan PSSI yang baru saja memilih ketua lewat Kongres Luar Biasa (KLB). Seperti tidak ada pintu negosiasi dan mediasi keduanya bersikeras mencari kebenaran dari kewenangan dan statuta FIFA.

Sejak dipilih Presiden Joko Widodo untuk menduduki jabatan menpora, Imam Nahrawi mengatakan salah satu prioritasnya adalah membenahi karut marut pengelolaan sepak bola di Indonesia, terutama kompetisi Liga Indonesia. Banyak kasus pemain yang tidak dibayar gajinya hingga ada yang meninggal dunia, membuat menpora prihatin.

Dalam undang-undang dijelaskan Pasal 29 ayat 2 bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional. Dalam hal ini pembinaan sepak bola profesional seharusnya diatur oleh organisasi PSSI. Namun yang terjadi saat ini induk organisasi sepak bola PSSI itu dibekukakn, sehingga kegiatan sepak bola tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Ini berarti kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Dalam agama Islam sistem pemerintahan haruslah didasarkan pada

tiga asas-asas dan kaidah-kaidah hukum Islam. Tiga asas tersebut yaitu humanisasi (memanusiakan manusia), liberasi (pembebasan dari pemaslahan sosial), dan transendensi. Ketiga unsur ini merupakan perkembangan keilmuan yang terkandung dalam Al Qur'an:

كنتم خير امة
 لناس تا مرون بالمعروف وتنهون عن المنكار وتؤمنون بالله ولو امن اهل
 الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون⁴

Dengan latar belakang tersebut, penulisan skripsi ini akan memfokuskan pada analisis langkah politik Imam Nahrawi terhadap pembekuan PSSI berdasarkan kepada nilai-nilai yang terkandung dalam politik profetik.

B. Rumusan Masalah

Dengan mencermati uraian permasalahan diatas, maka penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang menyebabkan Menpora Imam Nahrawi mengeluarkan kebijakan pembekuan PSSI?
2. Bagaimana pandangan politik propetik melihat kebijakan tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

⁴ Āli Imr n (3) : 110

Berdasarkan pokok masalah yang dirumuskan diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a) Untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan Menpora Imam Nahrawi mengeluarkan kebijakan pembekuan terhadap PSSI.
- b) Untuk menjelaskan bagaimana pandangan politik propetik terhadap kebijakan yang dikeluarkan Menpora Imam Nahrawi.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan persoalan dan tujuan diatas, penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat secara teoritis maupun praktis:

- a) Kegunaan secara teoritis adalah untuk memperkaya khazanah intelektual, khususnya dalam domain spritualitas dan politik.
- b) Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi studi tentang kebijakan politik di Indonesia.
- c) Menjadi pedoman bagi praktisi politik dalam menjalankan etika (*fatsoen*) politik di wilayah politik praktis.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari duplikasi karya tulis ilmiah serta menunjukkan keaslian penelitian ini, maka dirasa perlu mengkaji berbagai pustaka yang berkaitan dengan penelitian dalam skripsi ini. Dari hasil telaah pustaka yang penyusun lakukan terhadap bahan-bahan kepustakaan yang tersedia baik melalui buku-buku maupun literatur lain, ternyata penyusun menemukan beberapa karya ilmiah yang membahas PSSI, namun belum ada yang lebih spesifik membahas mengenai pembekuan PSSI. Adapun karya ilmiah yang penyusun temukan mengenai PSSI adalah sebagai berikut:

Skripsi “Suksesi Ketua PSSI Perspektif Politik Islam (Pasca Kepemimpinan Nurdin Halid)”. Skripsi ini menjelaskan mengenai mekanisme pengangkatan ketua PSSI yang diatur dalam statuta PSSI. Pasca lengsernya Nurdin Halid tongkat estafet kepemimpinan PSSI beralih ke tangan Djohar Arifin.⁵

Skripsi yang ditulis oleh Srie Agustina Palupi yang berjudul “Sepak bola dan Politik (1920-1942)”, skripsi ini hanya membahas tentang politik yang terjadi di dalam tubuh persepak bolaan Indonesia, khususnya di Jawa pada tahun 1920-1942.⁶

⁵ Agus Dwi Purwanto, *Suksesi Ketua PSSI Perspektif Politik Islam (Pasca Kepemimpinan Nurdin Halid)*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2013)

⁶ Srie Agustina Palupi, *Sepak Bola dan Politik (1920-1942)*, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gajah Mada, 2004).

Skripsi yang ditulis oleh Adam Dliya Ulhaq Jurusan ilmu politik fakultas sosial humaniora Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang berjudul “Olahraga dan politik, Studi Kasus Peran Pemerintah dalam Konflik Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia PSSI”, skripsi ini membahas mengenai peran pemerintah dalam mengatasi konflik yang terjadi di tubuh PSSI. Skripsi ini juga menjadi respons terhadap kisruh sepak bola yang terjadi pada tahun 2010-2013 yang pada saat itu berdampak pada prestasi sepak bola Indonesia, kekalahan demi kekalahan dialami tim nasional Indonesia dan Indonesia pada saat itu berada di peringkat 170 ranking FIFA.⁷

Dari beberapa karya ilmiah di atas penulis menemukan kesamaan antara karya ilmiah dari Adam Dliya Ulhaq dengan karya yang penulis buat. Kesamaan tersebut adalah kedua karya ilmiah yang dibuat sama-sama menjelaskan antara olahraga dan politik. Namun secara substansi keseluruhan tidaklah sama. Karya ilmiah Adam Dliya Ulhaq lebih menjelaskan peranan pemerintah dalam konflik yang terjadi di tubuh PSSI dan juga sebagai respons terhadap kisruh sepak bola yang terjadi pada tahun 2010-2013. Sedangkan karya ilmiah yang penulis susun ini lebih menekankan kepada langkah pemerintah yang menjatuhkan sanksi kepada PSSI dengan menggunakan pendekatan politik profetik yang di dalamnya mengandung misi humanisasi, liberasi, dan transendensi. Ketiga misi tersebut

⁷ Adam Dliya Ulhaq, “*Olahraga dan Politik, Studi Kasus Peran Pemerintah dalam Konflik Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia PSSI*”, (Jakarta: Fakultas Sosial Humaniora, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2013)

diharapkan mampu menakar manfaat dari kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah khususnya dalam permasalahan sepak bola ini.

E. Kerangka Teoritik

Melihat dampak dari permasalahan sosial-politik yang diakibatkan dari kebijakan Menpora Imam Nahrawi mengenai pembekuan PSSI, maka penulis akan menggunakan beberapa teori untuk membahasnya, seperti:

1. Teori Politik Profetik

Secara sederhana teori profetik adalah sistem pemerintahan yang didasarkan pada tiga asas-asas dan kaidah-kaidah hukum Islam. Etika profetik mempunyai tiga tujuan yaitu humanisasi, liberasi, dan transendensi. Ketiga unsur ini merupakan perkembangan keilmuan yang terkandung dalam Al Qur'an:

كنتم خير امة
لناس تا مرون بالمعروف وتنهون عن المنكار تؤمنون بالله ولو امن اهل
الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون⁸

Ayat tersebut menurut Kuntowijoyo memuat tiga nilai. Ketiganya adalah humanisasi, liberasi, dan transendensi. Humanisasi sebagai padanan *ta'mur na bi*

⁸ Ali Imr n (3): 110

al-ma'r f, liberasi padanan *tanhawna 'an al-munk r*, dan transendensi padanan *tu'min na billah*.⁹

a. Humanisasi

Di dalam ilmu politik profetik, humanisasi artinya memanusiakan manusia, menghilangkan “kebendaan”, ketergantungan, kekerasan dan kebencian dari manusia. Humanisasi sesuai dengan semangat liberalisme Barat. Hanya saja perlu segera ditambahkan, jika peradaban Barat lahir dan bertumpu pada humanisme antroposentris, konsep humanisme politik profetik berakar pada humanisme teosentris. Karenanya, humanisasi tidak dapat dipahami secara utuh tanpa memahami konsep transendensi (tuhan) yang menjadi dasarnya (telah menciptanya).

Keadaan masyarakat yang telah bergeser dari pola hidup masyarakat petani menjadi masyarakat industri, telah banyak menanggalkan aspek kemanusiaan yang mendasar. Akibatnya, manusia pada masyarakat industri terjebak di tengah-tengah mesin pasar dan politik yang menempatkan manusia sebagai subordinat, karena perannya yang parsial dan banyak digantikan oleh mesin.¹⁰

⁹ Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu : Epistemologi , Metodologi, Etika*. (Yogyakarta: Tiara Wacana. 2007). Hlm. 91-92

¹⁰ Muhammad Nur, “*Rekonstruksi Epistemologi Politik: dari Humanistik ke Profetik*” (Jurnal *Asy-Syir'ah*, Vol. 48, No. 1, Juni 2014), hlm. 31.

b. Liberasi

Tujuan liberasi adalah pembebasan manusia dari jerat-jerat sosial. Pembebasan dari jeratan kejahnya kemiskinan struktural, keangkuhan teknologi, dan pemerasan kaum bermodal. Sederhananya, paradigma profetik ingin membebaskan diri dari belenggu yang dibangun sendiri tanpa sadar.

c. Transendensi

Tujuan transendensi mengembalikan realitas masyarakat pada kesadaran metafisik. Transendensi ini berfungsi pula untuk menggeser keadaan yang dekaden pada puncak pencapaian spiritualitas. Pencapaian dimaksud adalah merasakan kehadiran Tuhan pada setiap margin kehidupan yang dilalui. Di mana pun, kapan pun, dan dalam keadaan apa pun, Tuhan menjadi orientasi utama di dalamnya.

Misi historis Islam dalam QS. Ali Imran ayat 110 di atas, baik humanisasi, liberasi, maupun transendensi bersifat kausalitas dengan awal frasa ayat tersebut. Pada bagian frasa *kuntum khayra ummatin*, sesungguhnya menanti *ta mur na bi al-ma r f, tanhawna 'an al-munk r*. Tidak akan menjadi umat terbaik, jika misi-misi tersebut diabaikan.

Pernyataan terakhir dikuatkan oleh Muhammad Taufiq Muhammad Sa'ad (1994: 36). Menurutnya, hadirnya kalimat "*ukhrijat li al-n s*" menegaskan bahwa kehadiran pribadi profetik adalah semata-mata untuk menjalankan misi tadi sampai pada terwujudnya "*kh yra ummat*". Muhammad Sa'ad mengutip

hadis riwayat Ahmad untuk menegaskan hal ini: “Sebaik-baik manusia adalah yang paling membaca, paling takwa, paling giat melakukan humanisasi (*amar ma’r f*), liberasi (*nahy munk r*), dan paling luas jaringannya (*silatu al-rah m*)”.

Sejak awal Islam telah menetapkan model ideal untuk bentuk kepemimpinan dalam firman Allah Swt.:

لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله

كثيرا¹¹

Karenanya, wacana humanisasi merupakan salah satu mantra komitmen Islam. Kedatangan Islam menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat yang tertindas oleh sistem dan struktur yang tidak adil.¹² Dan ini sebagai dalil, bahwa kelaliman sesungguhnya bukan melekat pada penguasa yang menindas, akan tetapi berlaku pula bagi masyarakat yang tertindas dan diam tak bergerak dalam upaya keluar dari ketertindasannya.¹³

2. Teori Kebijakan Publik

Menurut Harrold Laswel dan Abraham Kaplan berpendapat bahwa kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktika-praktika sosial yang ada dalam masyarakat. Ini berarti kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam

¹¹ Al-Ahz sb (33): 21

¹³ <http://irhamnirofiun.blogspot.com/2014/04/membumikan-kepemimpinan-profetik.html>

masyarakat.¹⁴ Menurut Charles O. Jones, istilah kebijakan (policy term) digunakan dalam praktik sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (goals), program, keputusan (decision), standar, proposal, dan grand design. Secara umum, istilah kebijakan atau policy digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintahan) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. Oleh karena itu, kita memerlukan batas atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat.¹⁵

F. Metode Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹⁴ AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik; Konsep Teori dan Aplikasi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 3.

¹⁵ Budi Winaryo, *Kebijakan Publik; Teori dan Proses*. (Yogyakarta: Media Pressindo, 2007), hlm. 16.

1. Jenis dan Sifat Penelitian.

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan objek kajian penelitian berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku yang bersangkutan, sehingga penelitian ini juga bisa disebut sebagai penelitian pustaka (library research).¹⁶ Adapun sifat penelitian ini adalah analisis deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena yang terjadi secara tepat, jelas, akurat, dan sistematis berdasarkan data yang diperoleh. Dengan menggunakan teknik analisis deskriptif penulis berharap dapat mendapatkan gambaran mengenai kebijakan politik Imam Nahrawi terhadap PSSI.

2. Pengumpulan Data.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi berasal dari dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Penulis juga menggunakan data pokok yaitu buku dan data penunjang seperti jurnal ilmiah. Dikarenakan fenomena pergolakan politik ini bersifat postulat yaitu pembicaraan masyarakat dan pemberitaan di media lebih banyak, dan sangat mencuri perhatian banyak masyarakat Indonesia serta media massa, maka penulis lebih banyak menggunakan artikel media massa, media massa elektronik dan juga media internet sebagai sumber data.

¹⁶ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sirasih, 1996), hlm. 159.

3. Analisis Data.

Analisis data di sini dimaksudkan sebagai bentuk interpretasi atau penelaahan atas data-data yang diperoleh di lapangan maupun pustaka secara efektif dan mampu memberikan kontribusi solutif terhadap realitas yang dihadapi. Berbagai temuan tersebut direspon secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis deduktif-interpretatif.¹⁷

4. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan yang digunakan adalah tinjauan politik profetik dan sosio-historis. Sosio-historis atau juga disebut sejarah sosial dimaksudkan untuk mengetahui berbagai peristiwa-peristiwa masa lalu yang berkaitan dengan unsur waktu, tempat, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut.¹⁸ Sehingga terungkap segi-segi sosial dari peristiwa yang dikaji, termasuk hubungan sosial, konflik kepentingan, status sosial serta mengungkapkan ide-ide peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu tertentu yang mempengaruhi perkembangan yang terjadi saat ini.¹⁹

¹⁷ Deduksi merupakan langkah analisis dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Sedangkan interpretatif adalah menafsirkan, membuat tafsiran tetapi tidak bersifat subyektif melainkan bertumpu pada evidensi obyektif untuk mencapai kebenaran yang obyektif. Dengan instrumen di atas, dicari dulu fakta-fakta di lapangan melalui interview, dokumen, dan dasar substansi penelitian. Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-49.

¹⁸ Taufik Abdullah, *Sejarah dan Masyarakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus 1987), hlm. 105.

¹⁹ Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press), hlm.46.

G. Sitematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran penulisan skripsi yang sistematis, maka penyusun membagi skripsi ini ke dalam lima bab, yang secara lengkap dapat penyusun gambarkan sebagai berikut:

Bab satu, yaitu pendahuluan yang berisi informasi tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menguraikan secara ringkas mengenai konsep dasar kebijakan, menguraikan kronologi, mekanisme, dan dampak yang terjadi atas pembekuan PSSI, serta mengkaji teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan masalah serta menjadi dasar dalam pemecahan masalah.

Bab ketiga, berisi gambaran umum yang didalamnya menguraikan sejarah sepak bola Indonesia. Profil sejarah dan kewenangan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, profil sejarah dan statuta dari Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI).

Bab keempat, analisis kebijakan politik imam nahrawi terhadap PSSI ditinjau dari perspektif politik profetik. Serta bab kelima, berisikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran-saran yang dapat dikemukakan pada hasil penelitian yang sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ada dua faktor yang menyebabkan Menpora Imam Nahrawi membekukan organisasi PSSI. Faktor pertama adalah faktor internal yang berasal dari kegelisahan Menpora melihat tidak adanya perkembangan dan peningkatan dalam hal prestasi. Menurunnya prestasi sepak bola Indonesia juga disebabkan ada campur tangan dari oknum organisasi yang terkait yaitu PSSI. Kemudian faktor kedua adalah faktor eksternal. Faktor dari luar yang menyebabkan Menpora memberikan sanksi terhadap PSSI adalah adanya laporan dari masyarakat yang juga mendorong Menpora untuk memberikan sanksi terhadap PSSI yang dinilai kinerjanya kurang baik dan juga di dalamnya banyak oknum yang tidak bertanggung jawab yang berdampak terhadap pengaturan skor.

Kewajiban pemerintah dalam sepak bola adalah mengawal dan memberikan fasilitas penunjang untuk meningkatkan kualitas pemain. Pemerintah tidak punya kewajiban untuk menyelenggarakan kompetisi. Karena kompetisi sejatinya di kelola dan dilaksanakan oleh organisasi sepak bola yang sah dan diakui oleh FIFA.

Namun yang terjadi sekarang ini adalah pemerintah secara langsung memberikn teguran berupa sanksi pembekuan terhadap PSSI yang berimbas

kepada pemberhentian kompetisi sepak bola. Dan juga pemerintah secara langsung membuat dan menyelenggarakan kompetisi.

Pemerintah sah-sah saja dalam membuat kebijakan karena setiap pemimpin memiliki visi dan misi yang berbeda dalam penentuan arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Asalkan pembuatan kebijakan tersebut bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan dan kemaslahatan dalam masyarakat. Niat dan tujuan dari Menpora Imam Nahrawi memang baik ingin membersihkan sepak bola dari para mafia yang bergerak bebas dan juga ingin memperbaiki prestasi sepak bola di kancah Internasional. Niatan baik Menpora ini tidak diimbangi dengan langkah yang baik juga. Yang akhirnya berimbas kepada para pelaku sepak bola dan masyarakat yang mencari kehidupan di lingkungan sepak bola.

Dalam dimensi politik profetik, unsur yang terkandung dalam kebijakan ini adalah liberasi atau semangat untuk mencegah yang mungkar, dalam hal ini pemerintah membersihkan para mafia. Namun untuk unsur lain seperti humanisasi dan transendensi tidak terkandung dalam kebijakan ini. Sehingga penulis menyimpulkan Kebijakan Pembekuan Sepak bola oleh Pemerintah ini belum sesuai dengan spirit dari Politik Profetik atau Politik Kenabian.

B. Saran

1. Pemerintah melalui Kemenpora harus mengkaji ulang terkait pemberian sanksi yang menyebabkan berhentinya kompetisi sepak bola Indonesia.
2. Untuk memutuskan sebuah kebijakan harus ada dialog khusus dengan organisasi atau pihak yang bersangkutan. Agar kebijakan yang dikeluarkan tidak bersifat sepihak yang akhirnya bisa merugikan masyarakat sepak bola Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia, Pustaka Agung Harapan 2006.

Baedhowi, *Humanisme Islam (Kajian Terhadap Pemikiran Filosofis Muhammad Arkoun)*, cet. Ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Drs. AG. Subarsono., M.Si., MA, *Analisis Kebijakan Publik; Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Hendrawan, Sanerya, *Spiritual Management: From Personal Enlightenment Towards God Corporate Governance*. Bandung: Mizan, 2009.

Hasan Hanafi, dkk., *Islam dan Humanisme (Aktualitas Humanisme Islam di Tengah Krisis Humanisme Universal)*, cet. Ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Islamy, M. Irfan, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Cetakan VIII. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Kuntowijoyo, *Islam sebagai Ilmu (Epistemologi, Metodologi, dan Etika)*, Edisi Kedua. Yogyakarta: Tirta Wacana, 2006.

Nawawi, Hadari, *Metodologi Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu : Epistemologi , Metodologi, Etika*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2007.

Lesmana, Tjipta , *Bola Politik dan Politik Bola*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Muhajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sirasih, 1996.

Nur, Muhammad, *Rekonstruksi Epistemologi politik: Dari Humanistik ke Profetik*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Natakusumah, Arif, *Drama Itu Bernama Sepak bola*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2008.

- Palupi, Srie Agustina, *Sepak Bola dan Politik (1920-1942)*, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gajah Mada, 2004.
- Parsons, Wayne, *Public Policy (Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan) alih bahasa oleh Tri Wibowo Budi Santoso*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Purwanto, Agus Dwi, *Suksesi Ketua PSSI Perspektif Politik Islam (Pasca Kepemimpinan Nurdin Halid)*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Taufik, Abdullah, *Sejarah dan Masyarakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus 1987.
- Ulhaq, Adam Dliya, *Olahraga dan politik, Studi Kasus Peran Pemerintah dalam Konflik Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesi PSSI*, Jakarta: Fakultas Sosial Humaniora, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2013.
- Winaryo, Budi, *Kebijakan Publik; Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2007.

B. INTERNET

- [Http://Bola.Liputan6.Com/Read/717666/3-Kunci-Taklukkan-Korsel-Salah-Satunya-Merahkan-Gbk](http://Bola.Liputan6.Com/Read/717666/3-Kunci-Taklukkan-Korsel-Salah-Satunya-Merahkan-Gbk). (diakses 24 November 2015) pukul 21.05.
- [Http://www.fifa.com/worldrankingtable/index.html](http://www.fifa.com/worldrankingtable/index.html) (diakses tanggal 5 September 2015) pukul 20.45
- [Http://www.republika.co.id/berita/sepak_bola/liga-indonesia/11/01/07/156996-Mediasi-dengan-lpi-eh-pssi-tak-hadir](http://www.republika.co.id/berita/sepak_bola/liga-indonesia/11/01/07/156996-Mediasi-dengan-lpi-eh-pssi-tak-hadir) (diakses tanggal 5 September 2015) pukul 20.30.
- [Http://irhamnirofiun.blogspot.com/2014/04/Membumikan-Kepemimpinan-Profetik.html](http://irhamnirofiun.blogspot.com/2014/04/Membumikan-Kepemimpinan-Profetik.html)
- [Http://ww.tempo.co/read/news/2011/01/05/099304037/mnpora-siap-mediasi-LPI-PSSI](http://ww.tempo.co/read/news/2011/01/05/099304037/mnpora-siap-mediasi-LPI-PSSI) (diakses tanggal 7 September 2015) pukul 21.10.

[Http://www.goal.com/news/1391/Superliga-Indonesia/2010/12/30/2283443/ikut-lpi-tiga-klub-superliga-degradasi](http://www.goal.com/news/1391/Superliga-Indonesia/2010/12/30/2283443/ikut-lpi-tiga-klub-superliga-degradasi)(diakses tanggal 7 September 2015) pukul 21.13

[Http://www.republiak.co.id/berita/sepak_bola/liga-indonesia/12/03/19/ml4r3z-inilah-kronologi-lengkap-perseteruan-pssi-dan-kpsi](http://www.republiak.co.id/berita/sepak_bola/liga-indonesia/12/03/19/ml4r3z-inilah-kronologi-lengkap-perseteruan-pssi-dan-kpsi) (diakses tanggal 7 September 2015) pukul 21.30.

[Http://Bola.viva.co.id/news/read/255023-pssi-ingkar-antv-siap-tempuh-jalur-huku](http://Bola.viva.co.id/news/read/255023-pssi-ingkar-antv-siap-tempuh-jalur-huku) (diakses tanggal 7 September 2015) pukul 21.45.

[Http://Bola.tempo.co/Read/News/2015/05/04/237663295/Pssi-Stop-Liga-Arema-Putus-Kontrak-Dengan-7-Sponsor](http://Bola.tempo.co/Read/News/2015/05/04/237663295/Pssi-Stop-Liga-Arema-Putus-Kontrak-Dengan-7-Sponsor), tgl 1 september 2015, 11.15

[Http://Kemenpora.go.id/index/profil](http://Kemenpora.go.id/index/profil) (diakses tanggal 4 September 2015) pukul 20.10

[Http://www.Profilpedia.Com/2015/01/Profil-Dan-Biografi-Imam-Nahrawi.Html](http://www.Profilpedia.Com/2015/01/Profil-Dan-Biografi-Imam-Nahrawi.Html)

www.bola.net/editorial/12-Alasan-Sepak_bola-Olahraga-Nomor-Satu-di-Dunia.html. (diakses tanggal 24 November 2015) pukul 20.54

Irhamni H. Rofi'un, Membumikan Kepemimpinan Profetik, <http://www.irhamnirofiun.com/2015/04/membumikan-kepemimpinan-profetik.html>, akses 10 April 2015.

C. Lain-Lain

Inilah.com, Inilah Surat Peringatan Menpora untuk PSSI.

Kompas, senin 27 april 2015, Kompetisi Harus Digulirkan

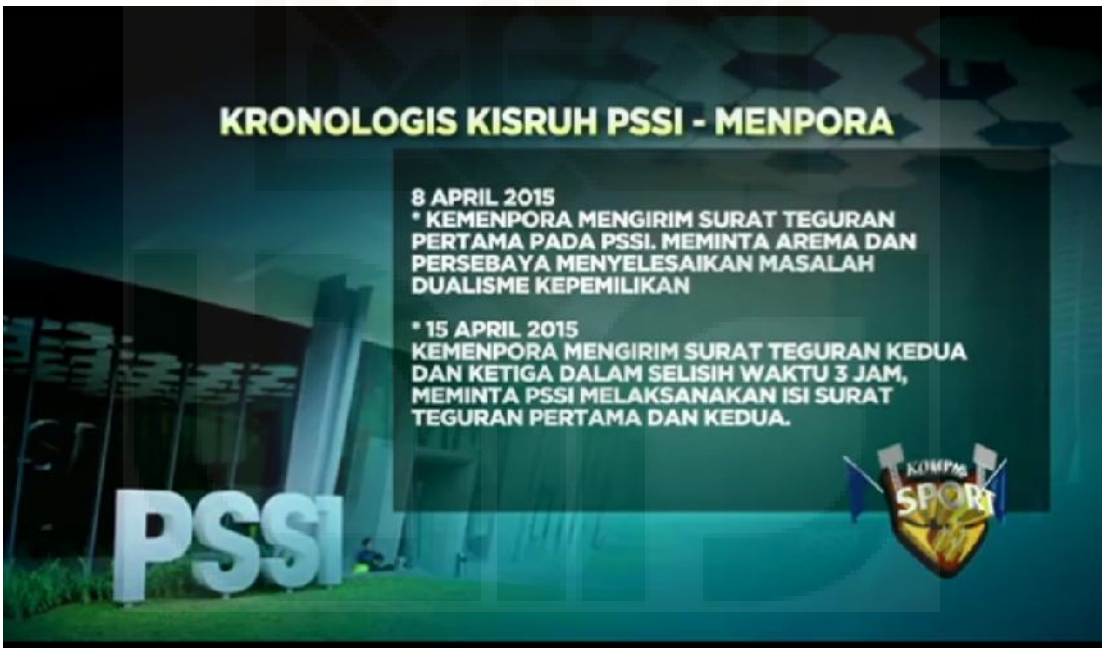
Maktabah Samilah, Software Hadis, 2011.

Wawancara Menpora Imam Nahrawi tentang Kisruh PSSI, Kompas tv, Youtube.com

Wawancara Kompas Sport bersama Menpora Imam Nahrawi



1. Kronologi



2. SK Menpora





**KEPUTUSAN
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01307 TAHUN 2015
TENTANG
PENGENAAN
SANKSI ADMINISTRATIF
BERUPA KEGIATAN KEOLAHRAGAAN
PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA TIDAK DIAKUI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat (2) dan Pasal 122 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Menteri mempunyai kewenangan untuk pengenaan sanksi administratif pada tiap pelanggaran administratif dalam pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan tingkat nasional;
- b. bahwa secara *de facto* dan *de jure* sampai dengan tenggat batas waktu yang telah ditetapkan dalam Teguran Tertulis Nomor 01133/Menpora/IV/2015 tanggal 8 April 2015, Teguran Tertulis II 01286/Menpora/IV/2015 tanggal 15 April 2015 dan Tegutan Tertulis III 01306/Menpora/IV/2015 tanggal 16 April 2015, Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia nyata-nyata secara sah dan meyakinkan telah terbukti mengabaikan dan tidak mematuhi kebijakan Pemerintah melalui Teguran Tertulis dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengenaan Sanksi Administratif berupa Kegiatan Keolahragaan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia tidak Diakui;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
5. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
8. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0009 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, dan Susunan Organisasi Badan Olahraga Profesional Indonesia (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 315);
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0010 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga Nasional (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 316);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLARHAGA TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA KEGIATAN KEOLAHRAGAAN PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA **TIDAK DIAKUI.**

PERTAMA : Pengenaan Sanksi Adminsitratif kepada Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, yang selanjutnya disingkat Sanksi Adminsitratif kepada PSSI berupa kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.

KEDUA : Dengan pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA, **maka seluruh kegiatan PSSI tidak diakui oleh Pemerintah**, oleh karena-nya setiap Keputusan dan/atau tindakan yang dihasilkan oleh PSSI termasuk Keputusan hasil Kongres Biasa dan Kongres Luar Biasa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak sah dan batal demi hukum bagi organisasi, Pemerintah di tingkat pusat dan daerah maupun pihak-pihak lain yang terkait.

KETIGA : Dengan pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada **DIKTUM PERTAMA** dan **DIKTUM KEDUA**, maka seluruh jajaran Pemerintahan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak dapat lagi memberikan pelayanan dan fasilitasi kepada kepengurusan PSSI, dan seluruh kegiatan keolahragannya.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Pemerintah akan membentuk Tim Transisi yang mengambil alih hak dan kewenangan PSSI sampai dengan terbentuknya kepengurusan PSSI yang kompeten sesuai dengan mekanisme organisasi dan statuta FIFA;
- b. Demi kepentingan nasional, maka persiapan Tim Nasional Sepakbola Indonesia untuk menghadapi *SEA Games 2015* harus terus berjalan, dalam hal ini Pemerintah bersama KONI dan KOI sepakat bahwa KONI dan KOI bersama Program Indonesia Emas (PRIMA) akan menjalankan persiapan Tim Nasional;
- c. Seluruh pertandingan *Indonesia Super League/ISL 2015*, Divisi Utama, Divisi I, II, dan III tetap berjalan sebagaimana mestinya dengan supervisi KONI dan KOI bersama Asprov PSSI dan Klub setempat.

KELIMA Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Tim Transisi sebagaimana dimaksud pada **DIKTUM KEEMPAT** huruf a, bertanggungjawab dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga

KEENAM : Biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2015.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2015
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



IMAM NAHRAWI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Presiden RI;
2. Bapak Wakil Presiden;
3. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Sekretaris Negara RI;
5. Menteri Dalam Negeri RI;
6. Menteri Luar Negeri RI;
7. Kepala Kepolisian RI;
8. Ketua Umum KONI Pusat;
9. Para Gubernur, Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

BAB	Hlm	Ayat Al-Qur'an dan Hadits	Terjemah
BAB I	4, 8	Ali Imron [3]: 110 كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَارَةً بِآيَاتٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَارِ وَأُولَئِكَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ	Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; diantara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.
BAB I	11	Al-Ahzab [33]: 21 لَمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا	Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu yaitu bagi orang yang mengharap Rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
BAB IV	64	Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, dan al-Tirmidzi tentang perintah mencegah kemunkaran. لِيُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَسَا نَهُ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَيَقْلِبْهُ وَذَلِكَ اِضْعَافُ الْاِيْمَانِ	Barangsiapa yang melihat kemunkaran hendaklah mengubahnya dengan tangan. Jika tidak mampu maka hendaklah mengubahnya dengan lisan. Jika tidak mampu hendaklah mengubahnya dengan sikap dalam hati. Namun yang terakhir ini adalah orang yang paling lemah imannya. Hr.Msulim, Abu Daud, dan al-Tirmidzi.

CURRICULUM VITAE

Nama : Fahman Zenal Mutaqin

TTL : Tasikmalaya, 25 April 1992

CP : 087845671788

Bapak : Abbas Bastaman

Ibu : Nunung Nuryamah

Alamat asal : Kp. Parakantiga Rt 014/Rw 002 Ds. Janggala Kec. Sukaraja Kab.
Tasikmalaya

Alamat Jogja : Ambarukmo Rt 12/Rw 04 Catur Tunggal, Depok, Sleman,
Yogyakarta

Riwayat Pendidikan :

1. SD. Parakantiga
2. MTs. Baitul Hikmah, Haur Kuning
3. MAN. Sukamanah
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta